

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arivia, G. (2005). *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jakarta: Ford Foundation.
- Chaerudin & Fadillah, S. (2004). *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grhadhika Press.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fadjar, M. A. (2005). *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Gosita, A., & Salam, M. F. (2005). *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Huraerah, A. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nusantara.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia.

- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kansil, C. S. T., Palandeng, E. R., & Musa, A. A. (2009). *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Kurnia, T. S. (2005). *Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (2004). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhadar., Abdullah, E., & Thamrin, H. (2009). *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rukmini, M. (2006). *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Sudaryono & Subakti, N. (2005). *Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Topan, M. (2009). *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup Prespektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Nusamedia.

Wadong, M.H. (2000). *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

Arliman, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 305-326.

Millah, I. A. (2020). Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(2).

Mozin, N., & Sunge, M. (2021). Pemberian Edukasi dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2).

Mu'alifin, D. A., & Sumirat, D. J. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).

Ngawiardi. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur di Parigi Moutong. *Journal Legal Opinion*, 4(4), 1-15.

Rosifany, O. (2020). Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Legalitas*, 5(2), 90-103.

Runturambi, F. J. (2015). Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti Dan Keyakinan Hakim. *Journal Lex Crimen*, 4(4).

Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(1).

Subawa, I. B. G., & Saraswati, P. S. (2021). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Jurnal Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 15(2), 169-178.

Suryani, N., & Mulyati, N. (2012). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas*, 10(2).

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Wawancara:

Wawancara dengan Ibu L. Tri Wulandari, S.H selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 16 September 2021 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Hendra, S.H selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 13.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Thusy Aprilliyandari, S.E selaku Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) DP3A PPKB Kota Surabaya, pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 10.17 WIB.

Website:

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, *Program Unggulan Standar Kinerja Penyidik*, https://satreskrimpolrestabessurabaya.com/page/view/44_program_unggulan, Diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 20.20 WIB.

Kasim, J. “*Pahami Batas Waktu Laporan Dalam Tindak Pidana*” <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/11/29/pahami-batas-waktu-laporan-dalam-tindak-pidana/>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 20.05 WIB.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana, <https://www.peraturanpolri.com/2011/12/pengawasan-dan-pengendalian-penanganan.html>, Diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 20.10 WIB.

Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, <https://www.peraturanpolri.com/2019/12/perpol-6-tahun-2019-pencabutan-perkap-manajemen-penyidikan.html>, Diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 20.15 WIB.

Prastyo, D. “*Paman Cabuli Keponakan Selama 2 Tahun Alasannya Istri Sakit*” <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4446773/paman-cabuli-keponakan-selama-2-tahun-alasannya-istri-sakit>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB.

Putri, V.K.M. “Wewenang Polri Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002” <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/26/172310569/wewenang-polri-menurut-undang-undang-nomor-2-tahun-2002>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 10.30 WIB.

Tim Situs Gue Sehat, “Dampak Yang Terjadi Pada Anak Korban Pelecehan Seksual” <https://www.google.com/amp/s/amp.guesehat.com/dampak-yang-terjadi-pada-anak-korban-pelecehan-seksual>. Diakses pada tanggal 15 November 2021 pukul 10.45 WIB.

Wewenang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, http://satreskrimpolrestabessurabaya.com/page/view/19_unit_ppa, Diakses pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 11.30 WIB.